

## IMPLEMENTASI LITERASI INFORMASI DALAM PROSES PENGOLAHAN BERITA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Ghina Zhahira<sup>1)</sup>, Marlina<sup>2)</sup>, Rini Asmara<sup>3)</sup>

<sup>1), 2), 3)</sup> Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Universitas Negeri Padang  
email: ghinazhahira1702@gmail.com

Diterima: 21/12/2025

Selesai Revisi: 28/12/2025

Diterbitkan: 31/12/2025

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi literasi informasi dalam proses pengolahan berita di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, khususnya pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada dua informan kunci yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, peliputan, penulisan, verifikasi, hingga publikasi berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengolahan berita dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan liputan, pengumpulan data, pencatatan poin penting, penyusunan rilis, verifikasi berlapis, dan publikasi melalui kanal resmi pemerintah. Implementasi literasi informasi tampak dalam kemampuan perilis menyeleksi informasi relevan, memverifikasi data kepada OPD, memahami konteks kebijakan, serta menyusun berita sesuai kaidah jurnalistik 5W+1H. Selain itu, tuntutan deadline yang ketat mendorong perilis untuk mampu mengelola informasi secara cepat dan akurat. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan jaringan, padatnya agenda liputan, serta kebutuhan standarisasi gaya penulisan.

**Keywords:** literasi informasi, pengolahan berita, komunikasi publik

### Abstract

This study aims to describe the implementation of information literacy in the news processing activities of the Provincial Government of West Sumatra, particularly within the Public Information and Communication Division (IKP) of the Communications and Informatics Office (Diskominfo). This research employs a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews with two key informants directly

*involved in the stages of planning, reporting, writing, verification, and publication of news. The findings show that the news processing workflow is carried out systematically through stages including coverage planning, data collection, note-taking of key points, news release preparation, multi-layer verification, and publication through official government channels. The implementation of information literacy is reflected in the ability of news writers to select relevant information, verify data with government agencies (OPD), understand policy contexts, and write news following the 5W+1H journalistic principles. In addition, strict deadlines require writers to manage information quickly and accurately. The main challenges identified include network limitations, a dense coverage agenda, and the need for standardized writing styles.*

**Keywords:** *information literacy, news processing, public communication*

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi (Habibah, 2021). Di tengah arus digital yang semakin padat, kemampuan memilah serta memverifikasi informasi menjadi kebutuhan yang sangat mendasar (Mardiyati, 2024). Berbagai laporan menunjukkan bahwa tingkat konsumsi informasi digital masyarakat Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam survei literasi digital nasional yang dilakukan sejumlah lembaga riset pada 2023, tercatat bahwa lebih dari 78% responden mengakses informasi melalui platform digital setiap hari, dan sekitar 64% di antaranya mengaku kesulitan membedakan informasi yang akurat dengan informasi yang bersifat manipulatif. Angka-angka tersebut mencerminkan betapa pentingnya penguatan literasi informasi pada berbagai lapisan masyarakat, termasuk pada institusi pemerintah sebagai salah satu produsen sekaligus penyalur informasi yang strategis (Aulia and Srg, 2024).

Dalam pemerintahan daerah, kebutuhan akan informasi yang akurat, cepat, dan mudah dipahami memiliki urgensi tersendiri (Hardiansyah and Jaffisa, 2024). Pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertanggung jawab menjadi sumber informasi publik yang kredibel (Makassar *et al.*, 2025). Informasi yang disampaikan pemerintah daerah berpengaruh langsung terhadap persepsi masyarakat, efektivitas kebijakan, serta stabilitas sosial. Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, setiap pemerintah daerah dituntut mampu menyajikan data dan informasi yang telah melalui proses verifikasi, analisis, dan pengolahan sesuai kaidah literasi informasi. Tidak mengherankan bahwa beberapa daerah di Indonesia telah mulai memperkuat kapasitas sumber daya manusianya dengan pelatihan literasi informasi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa penguasaan literasi informasi bukan lagi sekadar kemampuan tambahan, melainkan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap unit kerja yang bersinggungan dengan pembuatan konten informasi publik.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki dinamika informasi cukup tinggi. Dengan jumlah penduduk lebih dari lima juta jiwa yang tersebar pada berbagai wilayah kabupaten dan kota, arus informasi pemerintahan harus

dikelola secara sistematis agar dapat menjangkau masyarakat secara efektif. Layanan informasi pemerintah daerah menjadi salah satu jalur penting yang digunakan masyarakat untuk memperoleh penjelasan mengenai kebijakan publik, kondisi sosial ekonomi, serta berbagai program pembangunan. Di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, proses pengolahan berita dilakukan oleh perangkat humas yang bertugas memantau peristiwa, mengumpulkan data, melakukan verifikasi, menulis naskah, dan menyebarkan berita melalui kanal resmi. Dalam aktivitas tersebut, penerapan literasi informasi memegang peran sentral untuk memastikan bahwa setiap berita yang dipublikasikan mencerminkan fakta yang telah divalidasi, bebas dari bias yang tidak perlu, serta sesuai dengan kebutuhan informasi publik.

Namun demikian, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa penerapan literasi informasi dalam pengolahan berita pemerintah tidak selalu berjalan optimal. Beberapa studi awal menemukan adanya tantangan pada aspek kualitas sumber informasi, kecepatan arus berita, serta keterbatasan jumlah pejabat pengelola informasi. Pada beberapa unit kerja, misalnya, satu pengelola informasi dapat menangani hingga 15-20 berita per minggu, sehingga proses verifikasi sering kali membutuhkan strategi yang lebih efisien. Selain itu, beragamnya platform komunikasi publik yang digunakan mulai dari situs resmi, media sosial, hingga rilis kepada media massa menuntut kemampuan literasi informasi yang adaptif (Permadi *et al.*, 2024). Setiap platform memiliki karakteristik audiens yang berbeda, sehingga proses pengolahan berita harus mempertimbangkan akurasi sekaligus relevansi informasi agar pesan pemerintah dapat tersampaikan dengan efektif (Masindo, 2018).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai Implementasi Literasi Informasi dalam Proses Pengolahan Berita Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami sejauh mana literasi informasi telah diterapkan oleh pemerintah daerah dalam setiap tahapan pengolahan berita, mulai dari identifikasi kebutuhan informasi, pencarian dan evaluasi sumber, proses analisis, hingga penyajian berita kepada publik. Fokus penelitian ini bukan hanya untuk menilai tingkat kemampuan literasi informasi aparat humas, tetapi juga untuk menggambarkan pola kerja, hambatan, serta strategi yang digunakan dalam menjaga akurasi dan kredibilitas informasi publik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik literasi informasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi pijakan bagi pengembangan kebijakan peningkatan literasi informasi, terutama pada unit yang bertugas mengelola komunikasi publik. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap implementasi literasi informasi, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi yang diproduksi, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

## **2. KAJIAN PUSTAKA / TEORITIS/PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **1) Literasi Informasi**

Literasi informasi adalah kemampuan individu dalam mengenali kebutuhan informasi, mencari, mengevaluasi, mengolah, dan menggunakan informasi secara

efektif serta etis (Hasan, Husna and Fitri, 2023). Konsep ini pertama kali populer pada era informasi modern ketika perkembangan teknologi semakin memudahkan distribusi informasi namun sekaligus membuka ruang terhadap munculnya informasi yang tidak akurat atau misinformasi. Beberapa ahli mendefinisikan literasi informasi sebagai seperangkat kompetensi yang memungkinkan seseorang memahami konteks informasi, menilai kredibilitas sumber, serta mengaplikasikan informasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kerangka kerja Society of College, National and University Libraries (SCONUL), literasi informasi mencakup tujuh elemen utama, yaitu identify, scope, plan, gather, evaluate, manage, dan present. Ketujuh elemen ini dapat digunakan sebagai fondasi untuk melihat sejauh mana individu atau institusi telah mampu mengelola arus informasi secara profesional. Di lingkungan pemerintahan, literasi informasi memiliki posisi yang strategis karena instansi pemerintah merupakan produsen informasi publik. Ketika kemampuan literasi informasi tidak diterapkan secara optimal, risiko terjadinya kesalahan informasi, kurangnya akurasi data, atau bias dalam penyajian berita menjadi lebih besar (Ridho, Ahmad Yuliana, Ayu Sasadila Zalwana, 2024).

## **2) Pengolahan Berita**

Pengolahan berita adalah rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan informasi, verifikasi, penulisan, hingga penyebaran informasi kepada publik melalui berbagai kanal komunikasi (Jufrizal, Karerek and Yusra Jamali, 2022). Proses ini lazim dilakukan oleh praktisi humas, jurnalis, ataupun lembaga yang memiliki mandate menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam pemerintahan daerah, pengolahan berita dilakukan oleh unit humas atau pejabat pengelola informasi yang bertanggung jawab menghasilkan konten resmi mengenai kebijakan, program pembangunan, kegiatan pemerintah, dan isu strategis daerah. Proses pengolahan berita meliputi beberapa tahap: (1) news gathering atau pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi; (2) verification atau pengecekan keabsahan data dan sumber; (3) news writing atau penyusunan berita dalam bentuk rilis; dan (4) publikasi melalui saluran resmi seperti website pemerintah, media sosial, atau kerjasama dengan media massa (Febrina Ita Fitri Anti *et al.*, 2019). Kualitas sebuah berita pemerintahan sangat dipengaruhi oleh ketepatan informasi serta kemampuan penulis berita dalam menyampaikan informasi secara objektif, ringkas, dan relevan dengan kebutuhan publik.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam bagaimana implementasi literasi informasi diterapkan dalam proses pengolahan berita di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus untuk memahami proses, pengalaman, serta makna yang muncul dari praktik kerja aparat humas dalam menghasilkan informasi publik. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu mereka

yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan informasi, seperti pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, staf humas, penulis berita pemerintah, serta admin media digital. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel mengenai pemahaman informan terhadap literasi informasi, proses pencarian dan verifikasi data, mekanisme penyusunan berita, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai implementasi literasi informasi dalam proses pengolahan berita pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sumatera Barat diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua informan kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan berita pemerintah. Data penelitian menunjukkan bahwa proses pengolahan berita di lingkungan pemerintah provinsi dilaksanakan secara sistematis, berjenjang, dan mengacu pada standar jurnalistik pemerintahan. Selain itu, literasi informasi terbukti menjadi kompetensi penting yang memengaruhi kualitas berita yang dihasilkan.

Berdasarkan wawancara dengan Informan 1 (I1) yang memiliki peran sebagai koordinator pengelolaan konten dan media komunikasi publik, seluruh proses pengolahan berita dikelola oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Informan menjelaskan bahwa alur kerja pengolahan berita bersumber dari dua mekanisme utama, yaitu berita yang berasal dari perencanaan internal dan berita yang berasal dari permintaan peliputan oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Ketika OPD membutuhkan peliputan, undangan resmi disampaikan kepada Bidang IKP, kemudian ditugaskan tim yang terdiri dari perilis dan fotografer. Setelah peliputan selesai, perilis kembali ke kantor untuk menyusun naskah berita berdasarkan catatan lapangan. Menurut Informan 1, proses pengolahan berita tidak berhenti pada tahap penulisan, tetapi harus melalui mekanisme koreksi berlapis. Informan menyatakan bahwa, *"Pertama dikoreksi oleh koordinator, kemudian oleh Kabid, dan terakhir oleh Kepala Dinas. Kalau sudah disetujui semua, barulah bisa tayang."* Mekanisme koreksi berlapis tersebut merupakan bagian penting dari proses verifikasi internal sebelum berita dipublikasikan melalui situs resmi pemerintah. Praktik ini menunjukkan penerapan pilar *evaluate* dan *manage* dalam kerangka literasi informasi SCONUL, di mana informasi tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dievaluasi dan dikelola secara sistematis untuk menjamin akurasi dan kredibilitasnya.

Dalam aspek verifikasi informasi, Informan 1 menegaskan bahwa *"sumber verifikasi utama tetap OPD penyelenggara, karena mereka pemilik data resmi."* Apabila terdapat informasi yang belum lengkap atau diragukan, perilis akan kembali menghubungi OPD terkait untuk melakukan klarifikasi. Praktik tersebut mencerminkan penerapan pilar *gather* dan *evaluate* dalam literasi informasi SCONUL, yaitu kemampuan mengumpulkan informasi dari sumber yang relevan serta menilai keandalan dan keabsahan informasi sebelum disampaikan kepada publik. Lebih lanjut, Informan 1 menjelaskan bahwa kriteria kelayakan berita ditentukan berdasarkan relevansi dengan kepentingan publik dan fungsi Diskominfo sebagai saluran resmi



pemerintah daerah. Informan menyatakan bahwa, *“Yang kita angkat terutama capaian, kegiatan, program, dan kebijakan pemerintah provinsi. Kalau kegiatan luar, harus ada unsur kolaborasi dengan Pemprov.”* Selain itu, pedoman penulisan berita mengacu pada prinsip jurnalistik 5W+1H serta arahan kementerian dalam penyusunan berita pemerintah. Informan menegaskan bahwa, *“Kami tetap berpedoman pada kaidah jurnalistik. 5W+1H itu wajib. Judul juga harus jelas dan mewakili inti kegiatan.”* Penerapan prinsip tersebut menunjukkan implementasi pilar *present* dalam SCONUL, yaitu kemampuan menyajikan informasi secara jelas, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan audiens.

Sementara itu, wawancara dengan Informan 2 (I2) yang berperan sebagai perilis memberikan gambaran lebih rinci mengenai praktik pengolahan berita di lapangan. Informan menjelaskan bahwa setelah meliput kegiatan, ia langsung mencatat poin-poin penting di ponsel dan sekaligus merekam pernyataan narasumber. Informan menyatakan, *“Saya langsung catat poin penting, dan rekam juga. Karena kadang narasumber bicara cepat, jadi perlu dicek ulang.”* Rekaman tersebut kemudian didengarkan kembali sebelum menyusun naskah rilis secara lengkap. Praktik ini mencerminkan penerapan pilar *gather* dan *manage*, yaitu kemampuan mengumpulkan, menyimpan, dan memanfaatkan kembali informasi secara efektif.

Setelah naskah selesai disusun, Informan 2 menyerahkan berita kepada editor pertama sebelum masuk ke tahap koreksi lanjutan. Informan menjelaskan, *“Setelah selesai, saya kirim dulu ke Bang Adam. Kalau sudah oke baru masuk grup yang isinya Kadis dan Bu Kabid.”* Proses ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi dilakukan secara kolaboratif dan terstruktur dalam kerangka kerja institusional. Tekanan waktu menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pengolahan berita. Informan 2 menegaskan bahwa, *“Kalau liputan pagi, siang harus tayang. Kalau liputan sore, malam harus naik. Lewat 2–3 jam sudah dianggap basi.”* Kondisi tersebut menuntut perilis untuk mampu mengelola informasi secara cepat tanpa mengabaikan akurasi. Oleh karena itu, informasi yang paling penting ditempatkan pada paragraf awal berita. Informan menyatakan, *“Informasi paling penting harus di atas. Banyak orang tidak baca sampai habis, jadi inti harus di awal.”* Strategi ini menunjukkan penerapan pilar *identify* dan *scope* dalam SCONUL, yaitu kemampuan mengidentifikasi dan membatasi informasi yang paling relevan untuk disampaikan kepada publik. Dalam penentuan judul berita, Informan 2 berupaya menulis judul yang deskriptif dan sesuai dengan gaya institusi. Informan menyatakan, *“Judul harus mewakili isi berita, tapi juga harus sesuai gaya Diskominfo.”* Apabila terdapat informasi yang belum diperoleh di lapangan, informan akan berkoordinasi dengan rekan kerja untuk melengkapi data. Praktik ini mencerminkan kemampuan kolaboratif dalam pengelolaan informasi serta penerapan pilar *plan* dan *manage* dalam literasi informasi.

Kedua informan sepakat bahwa literasi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas berita pemerintahan. Informan 1 menegaskan bahwa *“semakin tinggi literasi informasi seorang perilis, semakin lengkap dan akurat berita yang dia buat.”* Hal serupa disampaikan oleh Informan 2 yang menyatakan bahwa literasi informasi membantunya memahami konteks kegiatan meskipun masa kerjanya relatif singkat. Informan menyatakan, *“Kalau tidak paham isu, tulisannya pasti kurang dalam. Makanya*

*saya sering cari istilah di Google atau ulang rekaman sambutan pejabat.”* Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengolahan berita di Diskominfo Provinsi Sumatera Barat telah mengikuti alur kerja yang terstruktur dengan mekanisme verifikasi berlapis. Implementasi literasi informasi yang tercermin dalam tujuh pilar SCONUL menjadi kompetensi inti yang memengaruhi kemampuan perilis dalam mengolah data, memahami konteks, menyusun berita, serta menjaga akurasi dan kredibilitas informasi publik.

## 5. PENUTUP (SIMPULAN DAN SARAN)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Literasi Informasi dalam Proses Pengolahan Berita Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan berita di Diskominfo Provinsi Sumatera Barat telah berjalan secara terstruktur, sistematis, dan mengikuti standar jurnalistik pemerintahan. Implementasi literasi informasi tampak kuat pada tahap pencarian data, verifikasi informasi, pengolahan berita, hingga proses publikasi yang melalui tiga lapis koreksi. Perilis dan fotografer bekerja berdasarkan dua sumber utama, yaitu perencanaan liputan internal dan permintaan peliputan dari OPD. Literasi informasi berperan penting dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konteks berita. Hal ini terlihat dari praktik pencatatan poin penting, penggunaan rekaman untuk verifikasi, serta kebiasaan menelusuri istilah dan data tambahan untuk memperkaya naskah. Selain itu, ketentuan deadline yang ketat di mana berita harus tayang dalam rentang 2–3 jam setelah kegiatan mendorong perilis untuk bekerja cepat namun tetap teliti. Kendala teknis seperti jaringan dan padatnya jumlah liputan dapat mempengaruhi proses, tetapi tidak menghambat kualitas berita secara signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, R. and Srg, M. (2024) 'Peran Media Digital dalam Meningkatkan Keterlibatan dan Partisipasi Publik : Transformasi Komunikasi di Era Informasi dan Sosial', 2(6), pp. 506–513.
- Febrina Ita Fitri Anti *et al.* (2019) 'Penggunaan Bahasa Jurnalistik dalam Penulisan Berita Metrojambi.Com', *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 4(2), pp. 165–188. Available at: <https://doi.org/10.30631/mauizoh.v4i2.35>.
- Habibah, A.F. (2021) 'Era Masyarakat Informasi sebagai Dampak Media Baru', 3(2), pp. 350–363.
- Hardiansyah, R. and Jaffisa, T. (2024) 'Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( SIPD ) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik yang Efektif dan Transparan ( Studi Kasus Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan )', 4, pp. 5194–5206.
- Hasan, K., Husna, A. and Fitri, D. (2023) 'Transformasi Komunikasi Massa Era Digital Antara Peluang Dan Tantangan', *JPP Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 8, pp. 41–55.
- Jufrizal, Karerek and Yusra Jamali (2022) 'Analisis Framing Pemberitaan Anies Baswedan Tentang Isu Korupsi', ... *Jurnal Kajian Mutu* ..., 5(<https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/sus/issue/view/200>), pp. 479–484.

- Makassar, U.H. *et al.* (2025) 'EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI APLIKASI LAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL ( MAKASSAR SMART CITY )', 11(November), pp. 1352–1375.
- Mardiyati, S. (2024) 'Sriyono 1 Sri Mardiyati 2', 7, pp. 16608–16612.
- Masindo, A.A. (2018) *Strategi Public Relations Detikcom dalam Meningkatkan Brand Loyalty, Repository UINJkt.* Available at: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43880>.
- Permadi, D. *et al.* (2024) 'Media Massa dan Kontruksi Realitas (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan UU IKN pada Media Online Tempo.co dan mediaindonesia.com)', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.31315/jik.v22i1.7754>.
- Ridho, Ahmad Yuliana, Ayu Sasadila Zalwana, S. (2024) 'Komunikasi Di Dunia Pendidikan Di Era Digital', *Journal of Social Computer and Religiosity (SCORE)*, Vol.2, No.(Bulan 3), pp. 1–11. Available at: <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/score/issue/view/401>.